

Judul : Djohar Arifin Bongkar Borok Sektor Pendidikan
Tanggal : Jumat, 21 Juni 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Rapat Panja Di Senayan

Djohar Arifin Bongkar Borok Sektor Pendidikan

Anggota Komisi X DPR Djohar Arifin Husin menyesalkan karut-marut dunia pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah lantaran menteri pendidikan saat ini sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan.

DJOHAR mengatakan, persoalan pendidikan sekarang ini salah satunya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tiba-tiba naik sangat signifikan di tahun 2024 ini. Problem UKT ini muncul karena Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak memiliki inovasi mencari pendanaan untuk membiayai operasional perguruan tinggi.

"Makanya Pimpinan Perguruan Tinggi ini semput, karena nggak tahu mencari sumber dana itu dari mana. Tahunya dari mahasiswa," kata Djohar dalam rapat Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Dirinya selalu mengingatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengajari

para rektor cara mengelola kampus negeri dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sebab selama ini, para rektor PTS tiap bulan berjibaku memikirkan sumber dana untuk membiayai gaji yang harus diberikan kepada seluruh dosen dan pegawai. "Kalau (rektor) PTS itu kan sudah terbiasa. Sementara PTN kan cuma terima bersih," sebutnya.

Makanya, dia meminta kepada para Pimpinan dan rektor PTN, untuk mulai mengubah cara berpikir. Salah satunya bisa dengan membentuk semacam fund raising yang halal sebagai salah satu upaya memperoleh pendanaan untuk perguruan tinggi negeri.

"Di luar negeri kan seperti itu. Jadi perguruan tinggi itu jangan mengharapkan (sumber pendan-

aan) mahasiswa dari hidupnya. Tetapi memiliki bisnis-bisnis usaha yang dibenarkan. Kenapa tidak dilakukan," sarannya.

Menurutnya, dengan status hukum PTN yang saat ini sudah berbadan hukum, maka perguruan tinggi dapat mencari pendanaan melalui usaha pertambangan, seperti emas atau batu bara. Atau melalui berbagai program pembangunan lainnya. Yang penting, tidak menjadikan mahasiswa sebagai sumber pendanaan utamanya.

"Kan ada tambang (Izin Usaha Pertambangan) emas, batu bara atau usaha bisnis apa, pembangunan segala macam, manfaatkanlah. Tidak harus mengeruk dana dari mahasiswa. Ini yang harus kita pikirkan," sebutnya.

Dia meyakini, dengan memiliki sistem pendanaan dari jenis usaha yang dibenarkan, maka perguruan tinggi memiliki keleluasaan untuk menghasilkan lebih banyak kajian-kajian dan penelitian. Melalui kajian dan

penelitian tersebut, income perguruan tinggi bisa semakin besar.

"Jadi maulah diajarkan kepada rektor PTN ini bagaimana perjuangan untuk mencari dana. Tidak seperti sekarang, duduk saja pun dia, uangnya tersedia," bilang politisi Fraksi Gerindra ini.

Dia mengakui, masih banyak hal yang harus diperbaiki dari segi regulasi dan undang-undang untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa. Sehingga pendidikan yang dihasilkan itu benar-benar merupakan lulusan yang andal.

"Kita tahu pendidikan kita mengharapkan jadi orang yang terbaik. Tapi yang cukup banyak masuk dalam perkara pidana itu, ya lulusan perguruan tinggi. Artinya, etika, akhlak, adab itu kita kesampingkan," katanya.

Djohar mengatakan, di belahan negara-negara dunia yang maju sumber daya manusianya, seperti Singapura, Korea Selatan, ternyata lebih mendahu-

lukan pendidikan akhlak, baru ilmu. Namun yang terjadi di Indonesia, justru sebaliknya. Makanya dia tidak heran, jika ada kejuaraan Olimpiade, perwakilan Indonesia itu selalu mendapat juara. "Sama-sama high school, tapi kita lebih tinggi karena kita mendahulukan mata pelajaran daripada pelajaran etika," tegasnya.

Makanya, dia berpandangan, walau anggaran pendidikan ini merupakan hal yang sangat penting. Namun masalahnya, berapa pun anggaran yang digelontorkan, tidak akan mengubah sikap bangsa lantaran pondasi bangsa untuk pendidikan ini tidak berjalan sesuai harapan. Perlu revolusi pendidikan supaya sektor pendidikan ini kembali ke jalan yang benar.

"Ya memang salah kita sih, menterinya bukan orang pendidikan. Kan belum lulus dia, belum doktor. Begitu mengurus doktor, profesor, ya kadang kabut. Ya salah kita," ujarnya. ■ KAL